

RENCANA AKSI SAKIP BIRO HUKUM DAN HAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	OUTOUT	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3		4	5	6	7				8	9
1.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	1. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan jadwal penyusunan produk hukum	Dokumen Propemperda dan jadwal penyusunan	√	√	√	√	Biro Hukum
						2. Melakukan fasilitasi, harmonisasi, pembahasan, dan evaluasi rancangan produk hukum daerah	Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya yang telah ditetapkan					
						3. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi produk hukum kepada perangkat daerah dan masyarakat	Laporan kegiatan sosialisasi, materi, dan daftar hadir					
						4. Melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi produk hukum daerah	Database dan dokumentasi produk hukum yang diperbarui					
						5. Menangani perkara hukum yang melibatkan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dokumen penanganan perkara, pendampingan hukum, dan laporan perkembangan perkara					
						6. Memberikan pendapat hukum (legal opinion), bantuan hukum, dan telaahan hukum kepada perangkat daerah	Dokumen legal opinion, telaahan hukum, dan surat pendampingan					
						7. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi Hak Asasi Manusia (HAM)	Laporan kegiatan, materi sosialisasi, dan dokumentasi					
						8. Mengoordinasikan pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	Dokumen data dukung dan laporan pemenuhan indikator					
						9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan produk hukum, penanganan perkara, dan program HAM	Laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi					